

Efektivitas Bantuan Pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat Di Indonesia

Listia Khairunnisa*

listiakhairunnisa@gmail.com

Abstract

The focus of this research is to explain the U.S. Peace Corps' aid effectiveness in assisting Indonesia from year 2010 to 2017. This research utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to explain the aid effectiveness. The method of this research is descriptive-analytical and uses interviews and observation as primary resources, also using books and articles as secondary resources. The result of this research shows that principles of Paris Declaration on Aid Effectiveness in Peace Corps Indonesia is almost effective in Local Alignment Principle, Harmonization Principle, and Mutual Accountability Principle. In addition to Policy Ownership Principle, English learning is not yet considered as a priority. Moreover, there are some differences in development plan and real activities that makes it become unoperational strategy. In Managing for Result Principle, since 2010, the amount of students, teachers and communities whose interact with the volunteer of Peace Corps keep increasing but there is no official framework that shows development result oriented.

Keywords: *Peace Corps, Peace Corps Indonesia, foreign aid, United States, Bappenas*

*Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas

Pendahuluan

Bantuan luar negeri merupakan fenomena yang sangat dinamis hingga saat ini. Dari awal implementasinya sejak pasca-Perang Dunia II, isu yang mengiringi terus bergerak dan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik internasional yang terjadi. Hal yang paling mempengaruhi isu bantuan luar negeri dewasa ini adalah tujuan pembangunan (development goals) yang dirumuskan oleh donor-donor internasional. Development goals menjadi acuan negara-negara donor dalam memformulasikan program-program bantuan yang akan disalurkan.¹

Peace Corps merupakan suatu agen bantuan pembangunan Amerika Serikat untuk negara-negara dunia ketiga dalam agrikultur, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat, lingkungan dan pembangunan pemuda.² Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1961 oleh Presiden John F. Kennedy, *Peace Corps* memiliki tujuan untuk:³

1. Membantu warga dari negara yang berminat untuk memenuhi kebutuhan

mereka akan tenaga terampil baik laki-laki maupun perempuan;

2. Membantu memperdalam pemahaman warga penerima bantuan tentang masyarakat Amerika Serikat;
3. Membantu memperdalam pemahaman warga Amerika Serikat tentang bangsa lain.

Peace Corps berbeda dengan *Agency of International Development*, *U.S. Red Cross Junior*, *Chamber of Commerce* atau badan bantuan lainnya. *Peace Corps* berbentuk badan independen yang terdiri dari sukarelawan yang berasal dari latar belakang ras, jenis kelamin, umur dan pekerjaan yang berbeda untuk disebarluaskan hingga ke seluruh dunia.⁴ Sukarelawan *Peace Corps* menggunakan waktu dan kemampuan mereka dengan bekerja sama selama dua tahun sebagai guru, penasehat usaha, konsultan teknologi dan informasi, kesehatan, penyuluh HIV/AIDS, serta pekerja pertanian.⁵ Mereka juga belajar meleburkan diri mereka ke dalam budaya negara tempat mereka bekerja serta berpartisipasi dalam proyek dan aktivitas pembangunan dan pelayanan yang

¹John Degenbol Martinussen dan Endberg Pedersen. *Understanding International Development Cooperation*. (London: Zed Books Ltd. 2003). hal 25.

²Tentang *Peace Corps*. <http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=about> (diakses tanggal 2 November 2016).

³The *Peace Corps. A Comprehensive Agency Assessment* (Peace Corps, Washington). 2010.

⁴Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*, 2015.

⁵*Peace Corps Indonesia. Laporan Tahunan 2012*. (Peace Corps Indonesia: Surabaya). 2012.

dirancang untuk masyarakat.⁶ Hingga saat ini *Peace Corps* telah tersebar di 140 negara dengan jumlah relawan lebih dari 220.000 orang.⁷

Sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, Indonesia menjadi salah satu tujuan implementasi kebijakan *Peace Corps*.⁸ Indonesia menjalin kerja sama dengan *Peace Corps*, dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963 (*Peace Corps Tahap I*)⁹ Indonesia pada saat tersebut menjalin kerja sama ini atas permintaan untuk memberi pelatihan bidang olahraga dan pendidikan fisik.¹⁰ Tiga tahun *Peace Corps* dijalankan di Indonesia, pada tahun 1965 bantuan pembangunan dihentikan karena politik Indonesia sedang tidak stabil.¹¹

Setelah lebih dari 40 tahun pemutusan kerja sama *Peace Corps* dengan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 2006, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kembali menyampaikan tawaran bantuan pembangunan di Indonesia.¹² Melalui surat Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas No. 6461/M.PPN/10/2006 kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dan surat No. 6463/M.PPN/10/2006 tanggal 31 Oktober 2006, pemerintah Indonesia telah menyampaikan penghargaan dan membuka diri terhadap kerja sama internasional sekaligus mengundang *Peace Corps* untuk membangun kembali programnya di Indonesia.¹³

Memorandum of Understanding (MoU) *Peace Corps* akhirnya ditandatangani kembali pada tanggal 11 Desember 2009 (*Peace Corps Tahap II*).¹⁴ Pencapaian ini merupakan hasil dari perkembangan penting hubungan bilateral Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

⁶ Ibid.

⁷Fast Facts. <https://www.peacecorps.gov/news/fast-facts> (diakses tanggal 2 November 2016).

⁸<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/RI-AS-Sepakati-Kerjasama-i-Peace-Corps-i-dan-i-Interfaith-Dialogue-i.aspx> (diakses tanggal 10 April 2017)

⁹Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*. (Bappenas: Jakarta). 2015.

¹⁰Rekso Graha & Suzie Sudarman. "Program *Peace Corps*: Implementasi *Smart Power* Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia". *Jurnal Prisma Vol. 35, No. 1* (2016).

¹¹<http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20141006/282424167459426> (diakses tanggal 10 April 2017).

¹²Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*. (Bappenas: Jakarta). 2015.

¹³ Ibid.

¹⁴Memorandum of Understanding. http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1304_USA-2009-0301.pdf (diakses tanggal 23 November 2016)

dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barrack Obama yang ditandai dengan disepakatinya *Comprehensive Partnership* pada bulan November 2010.

Kerjasama *Peace Corps* dan Indonesia dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam *Paris Declaration* dan *The Jakarta Commitment*. Dari aspek manfaat, selayaknya kedua belah pihak memperoleh manfaat yang bersifat resiprokal.¹⁵

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang dipaparkan, maka penting untuk melihat perubahan fokus implementasi *Peace Corps* Tahap I (1963-1965) menjadi *Peace Corps* Tahap II (2010-2015) serta melihat efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* menggunakan *Paris Declaration*.

Kerangka Pemikiran

Aid Effectiveness secara sederhana dapat diartikan sebagai efektifitas bantuan pembangunan (*development aid*) dalam mencapai pembangunan manusia dan

ekonomi, atau juga dapat diartikan sebagai target-target pembangunan.¹⁶ Agensi-agensi donor dan lembaga-lembaga *think tank* internasional terus menerus mencari cara-cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas bantuan, termasuk dalam *conditionality*, *capacity building*, dan usaha untuk meningkatkan *governance*.¹⁷ Isu mengenai *aid effectiveness* ini mendapat perhatian semenjak munculnya banyak laporan mengenai kegagalan usaha bantuan luar negeri dalam upaya pembangunan, terutama di wilayah Afrika dan Asia Selatan.

Salah satu organisasi yang berkomitmen menangani masalah bantuan luar negeri adalah *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*.¹⁸ Pada tahun 2005, *OECD* menginisiasi pertemuan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*.¹⁹ *Paris Declaration 2005* merupakan sebuah titik tolak munculnya kesadaran untuk lebih memperhatikan

¹⁵ Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2016*. (Bappenas: Jakarta). 2016.

¹⁶ Shaka Mahottama, *Analisis Terhadap Implementasi Bantuan World Bank Dalam menekan Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2010*. (Tesis: Universitas Indonesia). 2012.

¹⁷ D. Kauffman. "Aid Effectiveness and Governance: The good, the bad, and the Ugly", *World Bank Outreach*. (Februari 2009).

¹⁸ Tentang *OECD* <http://www.oecd.org/about/> (diakses tanggal 6 April 2017)

¹⁹ *Paris Declaration and Accra Agenda for Action*, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarati onandaccraagendaforaction.htm> (diakses tanggal 6 April 2017).

pertanggungjawaban atas aliran bantuan luar negeri di berbagai negara. Selama ini, usaha bantuan luar negeri seringkali dikritik tidak efektif dan hanya akan berfungsi sebagai alat pihak donor dalam mencapai tujuannya di negara penerima.

Pertemuan ini mengumumkan lima prinsip dasar *aid effectiveness*, yaitu:²⁰

1. Kepemilikan Kebijakan (*Policy Ownership*), yang mengharuskan bagi negara berkembang untuk memiliki kebijakan dan strategi pembangunannya sendiri, serta mengelola usaha pembangunan mereka di lapangan.
2. Keselarasan Lokal (*Local Alignment*), yang mengharuskan bagi para pendonor untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan negara berkembang, dan apabila memungkinkan harus selalu memprioritaskan lembaga dan institusi lokal dalam pengelolaan bantuan.
3. Harmonisasi (*Harmonization*), yang mewajibkan bagi para donor untuk melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan kepada negara berkembang, agar bantuan yang ada tidak tumpang tindih dan menyusahkan pemerintah negara penerima bantuan.

4. Pengelolaan Berbasis Hasil Pembangunan (*Managing For Results*), yang mewajibkan semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan untuk mengutamakan dan memperhatikan hasil dari bantuan tersebut, tidak hanya sekedar penyaluran teknis, melainkan mengembangkan metode, alat dan mekanisme untuk mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar memiliki hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat penerima.
5. Pertanggungjawaban Bersama (*Mutual Accountability*), para donor dan negara berkembang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan secara transparan satu sama lain, kepada masyarakat, serikat parlemen, mengenai dampak dan hasil dari bantuan tersebut.

Kelima prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* kemudian dilengkapi dengan 12 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah implementasi prinsip-prinsip tersebut terpenuhi.

²⁰ Join Evaluation of Paris Declaration. Phase 2: Final Report. 2010.

Tabel 1.1 Prinsip-prinsip Paris Declaration

No	Prinsip Paris Declaration	Indikator	Parameter
1	Kepemilikan Kebijakan (<i>Policy Ownership</i>)	1.1 Kepemilikan strategi yang bersifat operasional.	Kemandirian negara penerima bantuan dengan menunjukkan kemampuannya untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai kepentingan dan kebutuhannya.
2	Keselarsan Lokal (<i>Local Alignment</i>)	2.1 Terdapatnya penguatan kapasitas lokal melalui koordinasi dukungan. Menghindari implementasi program yang tumpang tindih. 2.2 Terdapatnya sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> yang dapat diandalkan. 2.3 Adanya penggun	Negara tidak terikat dan tidak serta merta bergantung kepada donor yaitu dengan mendahulukan kepentingan lokal.

		aan sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> nasional. 2.4 Kepastian bahwa aliran bantuan mengutamakan prioritas nasional. 2.5 Bantuan memiliki sifat mudah diprediksi. 2.6 Bantuan bersifat tidak mengikat, <i>minimum conditionalities</i> .	
3	Harmonisasi (<i>Harmonization</i>)	1.1 Adanya prosedur umum dalam aliran bantuan luar negeri. 1.2 Adanya <i>joint mission</i> dan <i>joint country analytic works</i> .	Adanya koordinasi dukungan dalam pemberian bantuan agar bantuan tidak tumpang tindih.
4	Pengelolaan yang berorientasi pada hasil pembangunan (<i>Managing for</i>	4.1 Adanya kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembang	Setiap program dan evaluasinya mengacu kepada hasil pembangunan di mana masyarakat dapat menikmati hasil dan program pembangunan

	<i>results</i>)	unan.	tersebut dengan dibentuknya kerangka pengelolaan hasil pembangunan.
5	Pertanggungjawaban bersama (<i>Mutual Accountability</i>)	5.1 Adanya mekanisme pertanggungjawaban bersama antara pemerintah dan donor, terutama dalam hasil-hasil pembangunan.	Adanya pertanggungjawaban dengan diterbitkannya laporan dalam rentang waktu tertentu.

Sumber: *Survey on Monitoring the Paris Declaration, Making Aid More Effective 2010*

Prinsip dan indikator yang terdapat dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* akan digunakan dalam bab pembahasan dalam penelitian mengenai efektivitas bantuan pembangunan Peace Corps di Indonesia.

Efektivitas Bantuan Pembangunan Peace Corps Amerika Serikat Di Indonesia

A. *Paris Declaration on Aid Effectiveness*

Paris Declaration merupakan sebuah titik tolak di mana muncul kesadaran dalam memperhatikan pertanggungjawaban atas aliran bantuan luar negeri di berbagai negara. Pertemuan *Paris Declaration*

dilakukan pada 2 Maret 2005.²¹ Selama ini, usaha bantuan luar negeri seringkali dikritik tidak efektif dan hanya akan berfungsi sebagai alat pihak donor dalam mencapai tujuannya di negara penerima. Negara penerima pun tidak kalah disorot, mengenai penggunaan bantuan luar negeri tersebut, negara-negara berkembang umumnya menjadi perhatian karena bantuan tersebut rawan dikorupsi.²²

B. Penerapan Prinsip-prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* dalam Pelaksanaan Program Peace Corps

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab 1, penelitian ini akan menggunakan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari pertemuan *Paris Declaration* tahun 2005. Berikut prinsip-prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* beserta indikator yang menjelaskannya.

Pembahasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-indikator yang ditetapkan *Paris Declaration on Aid Effectiveness* demi memudahkan menganalisis efektivitas bantuan pembangunan Peace Corps Amerika Serikat

²¹ Paris Declaration on Aid Effectiveness Report, High Level Forum, 2005

²² Does foreign aid make NGOs corrupt? <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/may/01/aid-local-ngos-dishonest-development> (diakses tanggal 5 Juni 2017)

di Indonesia. Pembahasan akan dibagi ke dalam lima sub bab berdasarkan prinsip *Paris Declaration on Aid Effectiveness* yang dibahas bersama dengan indikator-indikator terkait prinsip tersebut.

Prinsip Kepemilikan Kebijakan (*Policy Ownership*)

Kepemilikan sebuah negara atas kebijakan pembangunannya menjadi sebuah prinsip penting tersendiri dalam efektivitas bantuan luar negeri. Prinsip ini menjelaskan bentuk kemandirian dari negara penerima bantuan dengan menunjukkan kemampuannya untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai kepentingan dan kebutuhannya.

Strategi pembangunan Indonesia terlihat dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam siklus 5 tahunan.²³ RPJMN 2010-2014 adalah rencana pembangunan berjangka lima tahun ke-2 dari empat RPJMN yang perlu disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang berjangka 20 tahun. Strategi pembangunan

pemerintah Indonesia yang khusus pada peningkatan pendidikan adalah diterbitkannya Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (RSKP) tahun 2010-2014, yang berisikan garis besar kegiatan untuk mencapai visi dan misi serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan.

Indikator yang terkait pada prinsip ini adalah kepemilikan strategi pembangunan yang bersifat operasional. Terlihat bahwa setiap program yang dijalankan oleh pemerintah memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan program. Kerja sama Peace Corps dengan Bappenas dalam pelaksanaannya memiliki alur strategi operasional mengenai bagaimana mekanisme relawan melakukan aktivitas di daerah di mana mereka ditempatkan. Kegiatan Peace Corps dapat dilakukan dengan efektif karena Indonesia mempunyai kepemilikan kebijakan (*policy ownership*) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan pemerintah Indonesia.

Prinsip Keselarasan Lokal (*Local Alignment*)

Prinsip keselarasan lokal dalam *Paris Declaration* memiliki indikator terbanyak, karena digunakan untuk mengukur apakah sebuah negara benar-

²³ Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

benar masih terikat dan tergantung kepada kepentingan donor atau mendahulukan kepentingan lokal. Prinsip ini penting untuk mengukur dan memastikan bahwa kapasitas lokal memadai dalam mendukung kepemilikan kebijakan sebuah negara.

Dalam usaha penguatan kapasitas lokal melalui koordinasi dukungan. Kerja sama Peace Corps dan Indonesia berusaha menghindari implementasi program yang tumpang tindih dengan memastikan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak. Dalam naskah pengaturan pelaksanaan, diatur tugas dan tanggung jawab para pihak.

Kementerian Pendidikan Nasional RI wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan sekolah untuk memastikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan ini; melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan relawan sesuai dengan pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan; dan berkoordinasi dengan institusi-institusi Pemerintah Indonesia terkait untuk mendukung kerja relawan.

Harmonisasi

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS membentuk *Joint Steering*

Committee antar instansi atau kementerian yang terdiri dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kementerian Agama RI, dan instansi pemerintahan atau kementerian lainnya yang terkait pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia.

Hubungan kelembagaan dalam koordinasi pelaksanaan Peace Corps terjalin sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak baik pemerintah Indonesia maupun pihak Peace Corps. Berikut rancangan institusional Program Peace Corps yang menjadi panduan koordinasi implementasi Peace Corps di Indonesia yang terlihat dari Gambar 4.1.

Corps di Indonesia yang perlu disepakati bersama oleh Pemerintah Indonesia dan AS sesuai dengan Nota Kesepahaman tentang program *Peace Corps* antar kedua pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam MoU:

*Such Implementing Arrangement should specify, inter alia, the objective, program of cooperation, the function of working group, financial arrangement, and other details relating to specific undertaking of all participants involved.*²⁸

Paparan di atas memperlihatkan bagaimana Pemerintah Indonesia serta Pemerintah AS sepakat menyusun naskah *Implementing Arrangement* untuk mengatur pelaksanaan program-program kerja sama teknik *Peace Corps* dan kegiatan-kegiatannya di Indonesia, termasuk fungsi *Working Group*, pengaturan pendanaan, dan perincian lainnya terkait kewenangan seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip Pengelolaan Yang Berbasis Pada Hasil Pembangunan

Prinsip ini mengukur hasil pembangunan di mana masyarakat sebagai target program-program pembangunan tersebut. Prinsip ini pada dasarnya mengukur apakah setiap program dan evaluasinya mengacu kepada kondisi hasil

pembangunan di mana masyarakat sebagai *stakeholder* utama dapat menikmati hasil dan program-program pembangunan tersebut. Dalam prakteknya, diharapkan baik donor maupun *recipient* memiliki kesepahaman atas indikator apa saja yang diharapkan dapat diukur atau dicari tahun dalam evaluasi bersama.

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas mengakui bahwa perkembangan untuk melaksanakan prinsip ini berkembang dengan lambat.²⁹ Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan koordinasi antara pemerintah dengan donor mengenai fokus evaluasi hasil program. Dalam hal ini, pemerintah masih lebih terpaku dalam melihat *achievement* dan masing-masing sektor melalui program-programnya.

Laporan *Peace Corps* Indonesia menjelaskan capaian relawannya dalam melaksanakan tiga tujuan *Peace Corps*. Tujuan pertama mengenai pertukaran dalam bidang teknis, sejak tahun 2010 di dalam ruang kelas di Jawa Barat dan Jawa Timur ada lebih dari 200 relawan telah bekerja dengan lebih dari 1.660 guru untuk

²⁸ Ibid

²⁹Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 [Http://Birohukum.Bappenas.Go.Id/Data/Data_Permen/Salinan_Permen%20ppn-Kepala%20bappenas%20nomor%205%20tahun%2016.Pdf](http://Birohukum.Bappenas.Go.Id/Data/Data_Permen/Salinan_Permen%20ppn-Kepala%20bappenas%20nomor%205%20tahun%2016.Pdf)

meningkatkan kefasihan berbahasa, rasa percaya diri, dan keterampilan dalam Bahasa Inggris siswa.

Sejak 2010, lebih dari 177.000 siswa yang diajar oleh relawan Peace Corps dan guru mitra mereka telah mengalami peningkatan dalam pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menggunakan Bahasa Inggris.³⁰ Di luar kelas, relawan dan guru mitra bekerja sama untuk membangun keterampilan siswa melalui klub Bahasa Inggris, kompetisi, proyek-proyek khusus, dan pengajaran informal di masyarakat. Sejak 2010, hampir 61.000 siswa telah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris yang dilakukan oleh relawan Peace Corps, dengan lebih dari 42 persen siswa memperlihatkan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris sebagai hasilnya.

Sejak 2010, relawan juga telah mengadakan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang menggambarkan dan memperluas tujuan kerangka kerja proyek Peace Corps di Indonesia. Dalam tujuh tahun, hampir 200 kegiatan dalam bidang pengembangan pemuda, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya telah memberikan manfaat kepada lebih dari

7500 anggota masyarakat.³¹ Dalam hal ini ada satu fokus khusus pada pemuda Indonesia, yang membangun jiwa kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan keterampilan hidup melalui berbagai kegiatan masyarakat yang digerakkan oleh relawan Peace Corps dan mitra mereka di berbagai institusi.

Dalam laporan tentang pencapaian tujuan kedua mengenai meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warga negara Amerika oleh warga negara Indonesia, Peace Corps menyebutkan bahwa dua dari tiga tujuan Peace Corps adalah mendorong pemahaman dan pertukaran lintas budaya antara masyarakat Amerika dan negara tujuan di mana mereka bertugas. Sejak hari pertama relawan tiba di negara tujuan untuk memenuhi komitmen dua tahun mereka, mereka langsung diterjunkan ke dalam budaya dan Bahasa Indonesia. Mereka tinggal dengan keluarga sepanjang masa penugasan mereka. Relawan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat Amerika melalui interaksi sehari-hari dengan mitra pengajar, rekan kerja, siswa, keluarga dan teman.

Relawan yang memiliki latar belakang usia, ras, suku, dan sosial yang berbeda mewakili keberagaman budaya

³⁰ Annual Report Peace Corps Indonesia 2015

³¹ Ibid.

Amerika. Dengan begitu, mereka bisa berbagi tradisi dan juga nilai-nilai budaya Amerika dengan berbagai cara yang kreatif. Baik itu melewati pelajaran tentang sejarah Amerika, menjadi tuan rumah untuk Hari Raya *Thanksgiving*, atau bermain *football* Amerika dengan siswa-siswa mereka, relawan menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman lintas budaya yang unik, baik secara formal maupun informal.

Dalam laporan tentang pencapaian tujuan ketiga mengenai meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warga negara Indonesia oleh warga negara Amerika, Peace Corps menyebutkan bahwa sebagian besar relawan Peace Corps aktif terlibat dalam pencapaian ini selama dan setelah masa kerja. Sebanyak 87 persen rata-rata relawan merasa bahwa pekerjaan serta interaksi dengan masyarakat dan sekolah membantu pencapaian tujuan tersebut. Lebih dari 65 persen relawan memiliki blog atau situs pribadi yang mereka perbaharui secara regular untuk berbagi pengalaman dan kesan tentang Indonesia atau masyarakat Indonesia; lebih dari 75 persen relawan menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *instagram* untuk berbagi cerita; dan 40 persen relawan telah menerima

kunjungan oleh teman dan keluarga ke komunitasnya.³²

Salah satu program bernama *World Wise School* juga merupakan salah satu cara untuk berbagi pengalaman dengan guru dan siswa di Amerika.³³ Program sahabat pena ini menjembatani ruang kelas di Indonesia dan Amerika dimana siswa-siswa dapat saling bertanya sehingga mewujudkan pola lain dari koneksi antar-masyarakat.

Prinsip Pertanggungjawaban Bersama

Pertanggungjawaban bersama diukur dari diterbitkannya laporan berkala dalam rentang waktu tertentu. Bappenas menerbitkan laporan kerjasama dengan Peace Corps pada tahun 2010, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dari sudut pandang pemerintah.

Laporan Bappenas berbentuk laporan kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia yang diterbitkan satu kali setahun yang memperlihatkan apakah tersalurkannya fasilitasi Bappenas dalam mendukung koordinasi yang baik di antara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan program Peace Corps. Melalui fasilitasi ini diharapkan program Peace Corps dapat berjalan secara optimal,

³² Ibid.

³³ Wawancara dengan *Country Director* Nina N. Favor, 22 Juni 2017

berkelanjutan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat pada khususnya.

Laporan Peace Corps berbentuk laporan tahunan yang diterbitkan satu kali setahun. Laporan tersebut berisi pencapaian yang telah dilakukan relawan Peace Corps baik dalam lingkungan siswa, lingkungan guru dan masyarakat. Laporan tahunan ini juga berisi penjelasan pelatihan yang diterima, penjelasan proyek-proyek apa yang dilakukan sampai kepada dampak yang dirasakan relawan Peace Corps setelah menyelesaikan program Peace Corps yang didukung dengan beberapa testimoni RPCV (*Return Peace Corps Volunteer*).

Laporan-laporan program ini memiliki standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan Peace Corps memiliki aturan standar mengenai laporan program yang ada. Laporan ini harus dikirimkan kepada masing-masing pihak untuk keperluan evaluasi dan *reporting*.

C. Efektivitas Bantuan Pembangunan Peace Corps di Indonesia

Setelah melakukan penelitian berdasarkan subbab-subbab di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bantuan pembangunan Peace Corps cukup efektif

apabila dilihat dari sudut pandang *Paris Declaration*.

Berikut rekapitulasi hasil temuan penelitian yang diolah oleh peneliti atas keefektivitasan Peace Corps di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* yang dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Keefektifitasan Peace Corps di Indonesia

Prinsip Paris Declaration	Hasil Temuan
Kepemilikan kebijakan - Kepemilikan strategi yang bersifat operasional	Perencanaan dan strategi pemerintah Indonesia sudah ada dan berjalan, dengan adanya RPJP, RPJM dan RSKP. Namun untuk RSKP, dalam usaha pembangunan pendidikan, pengajaran Bahasa Inggris belum menjadi prioritas utama. Masih adanya perbedaan rancangan pembangunan dengan yang dilakukan di lapangan membuat strategi yang dilakukan belum

Listia Khairunnisa | Efektivitas Bantuan Pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia

<p>Keselarasan Lokal (<i>Local Alignment</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya penguatan kapasitas lokal melalui koordinasi dukungan. Menghindari implementasi program yang tumpang tindih. - Terdapatnya sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> yang dapat diandalkan. - Adanya penggunaan sistem manajemen keuangan publik dan <i>procurement</i> nasional. - Kepastian bahwa aliran bantuan mengutamakan prioritas nasional. - Bantuan memiliki sifat mudah diprediksi. - Bantuan bersifat tidak mengikat, minim <i>conditionalities</i>. 	<p>operasional.</p> <p>Koordinasi yang baik antara pihak Peace Corps dengan pihak pemerintahan Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Baiknya koordinasi dicapai karena sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab serta alur koordinasi yang jelas. Prioritas nasional Indonesia memang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Peace Corps. Relawan mengabdikan dirinya untuk pembangunan Indonesia khususnya peningkatan pendidikan. <i>Conditionalities</i> yang diberikan kedua pihak cukup banyak, namun persyaratan dan kewajibannya dijelaskan secara jelas.</p>	<p>(<i>Harmonization</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya prosedur umum dalam aliran bantuan luar negeri. - Adanya <i>joint mission</i> dan <i>joint country analytic works</i> 	<p>melalui Bappenas dengan Peace Corps memiliki harmonisasi yang baik. Motif dan kepentingan dapat dijalankan kedua pihak dengan baik.</p>
<p>Harmonisasi</p>	<p>Pemerintah</p>	<p>Pengelolaan yang berorientasi pada hasil pembangunan (<i>Managing for results</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan. 	<p>Sejak tahun 2010 jumlah siswa, guru dan masyarakat yang berinteraksi dan merasakan bantuan pembangunan yang diberikan Peace Corps terus meningkat namun tidak ada kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan.</p>
		<p>Pertanggungjawaban bersama (<i>Mutual Accountability</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya mekanisme pertanggungjawaban bersama antara pemerintah dan donor, terutama dalam hasil-hasil pembangunan 	<p>Mekanisme pelaporan antara pemerintah dan Peace Corps sudah ada dan diterbitkan secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi juga dilakukan pemerintah lewat Bappenas.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti
 Hasil temuan di atas memperlihatkan pengaplikasian *Paris Declaration on Aid*

Effectiveness dalam implementasi Peace Corps di Indonesia menggunakan prinsip dan indikator yang sudah disepakati. Hasil temuan disimpulkan dari proses studi pustaka dan wawancara.

Kesimpulan

Program Peace Corps pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama melalui MoU yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963. Program ini kemudian berhenti pada tahun 1965. Pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membahas *Comprehensive Partnership* serta kesiapan Amerika Serikat untuk mengirimkan kembali Peace Corps ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menanggapi hal ini secara positif. Melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, *Memorandum of Understanding (MoU)* Peace Corps akhirnya ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan dokumen *Implementing Arrangement (IA)* atau pengaturan pelaksanaan program telah ditandatangani masing-masing oleh Peace Corps dan

Kementerian Pendidikan Nasional (kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian Agama pada tanggal 15 Juni 2011.

Menurut Bappenas, Indonesia mengharapkan kerjasama dengan Peace Corps dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam *Paris Declaration* dan *the Jakarta Commitment*.

Paris Declaration on Aid Effectiveness merupakan sebuah upaya bersama negara-negara dunia untuk menetapkan indikator-indikator pengukuran keefektivitasan suatu bantuan luar negeri. Di Indonesia diteruskan dengan dibentuknya *Jakarta Commitment* yang menekankan keikutsertaan Indonesia menjadi negara yang mendukung keefektivitasan bantuan luar negeri.

Aktifitas bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Peace Corps, berdasarkan prinsip-prinsip dan indikator-indikator *Paris Declaration on Aid Effectiveness*, peneliti menemukan bahwa dari prinsip kepemilikan kebijakan, perencanaan dan strategi pemerintah Indonesia sudah ada dan berjalan, dengan adanya RPJP, RPJM dan

RSKP. Namun untuk RSKP, dalam usaha pembangunan pendidikan, pengajaran Bahasa Inggris belum menjadi prioritas utama.

Prinsip keselarasan lokal memperlihatkan koordinasi yang baik antara pihak Peace Corps dengan pihak pemerintahan Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Baiknya koordinasi dicapai karena sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab serta alur koordinasi yang yang jelas. Prioritas nasional Indonesia memang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Peace Corps. Relawan mengabdikan dirinya untuk pembangunan Indonesia khususnya peningkatan pendidikan. *Conditionalities* yang diberikan kedua pihak cukup banyak, namun persyaratan dan kewajibannya dijelaskan secara jelas.

Dari prinsip harmonisasi, pemerintah melalui Bappenas dengan Peace Corps memiliki harmonisasi yang baik. Motif dan kepentingan dapat dijalankan kedua pihak dengan baik. Dari prinsip pengelolaan yang berbasis hasil pembangunan, sejak tahun 2010 jumlah siswa, guru dan masyarakat yang berinteraksi dan merasakan bantuan pembangunan yang diberikan Peace Corps terus meningkat. Dari prinsip pertanggungjawaban bersama, mekanisme

pelaporan antara pemerintah dan Peace Corps sudah ada dan diterbitkan secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi juga dilakukan pemerintah lewat Bappenas.

Dari prinsip dan indikator yang dihasilkan oleh *Paris Declaration*, dapat dilihat bahwa aktifitas yang dilakukan Peace Corps sudah cukup efektif pada Prinsip Keselarasan Lokal, Prinsip Harmonisasi dan Prinsip Pertanggungjawaban Bersama, hanya ada kekurangan di Prinsip Kepemilikan Kebijakan dan Prinsip Pengelolaan yang Berorientasi Pada Hasil Pembangunan. Pada Prinsip Kepemilikan Kebijakan, RSKP (Rencana Strategis Kementerian Pendidikan) dalam usaha pembangunan pendidikan, pengajaran Bahasa Inggris belum menjadi prioritas utama. Adanya perbedaan rancangan pembangunan dengan yang dilakukan di lapangan membuat strategi yang dilakukan belum operasional. Pada Prinsip Pengelolaan yang Berorientasi Pada Hasil Pembangunan, sejak tahun 2010 jumlah siswa, guru dan masyarakat yang berinteraksi dan merasakan bantuan pembangunan yang diberikan Peace Corps terus meningkat namun tidak ada kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Henriot, P.J., *Development Alternatives: Problem, Strategis, Values* dalam Charles K, Wilber, *Political Economy Of Development And Underdefelopment*, 1979.
- Hettne, B., *Development Theory And Third World*, SAREC Report No.2, Stockholm: Swedish Agency For Research Cooperation With Developing Countries, 1982.
- Halim, Amran, *Politik Bahasa Nasional 2*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Holsti, K.J, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. terj. Efin Sudrajat dkk, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.
- Kennedy, John F, *Strategy of Peace*, New York: Harper&Brother, 1960.
- Lancaster, Carol, *Foreign Aid; Diplomacy, Development, Domestic Politics*, London: University of Chicago Press, 2007.
- Marshall, Catherine & Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, California: Sage Publications Inc, 1999.
- Martinussen, John Degnbol dan Endberg Pedersen, *Understanding International Development Cooperation*, London: Zed Books Ltd, 2003.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Price, Harry Bayard, *The Marshall Paln & Its Meaning*. New York: Cornell University Press Ithaca, 1955.
- Sen, Amartya, *Kemerdekaan Cara dan Tujuan Pembangunan*, Yogyakarta: Jurnal Wacana Insist Press.

Veen, Va der, *Ideas, Interest and Forein Aid*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

W. Best. John, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Disunting oleh Drs. Mulyadi Guntur Waseso dan Drs. Sanafiah Faisal, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

W. Cresswell, John, *Fourth Edition Research Desaign, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Universitas Nebraska, Lincoln: Sage Publications, 2013.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Huda Muya Jannah, Annisa, "Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui United States Agency For International Development (USAID) Pada Bencana Alam Di Filipina", Skripsi, Universitas Jember, 2012.

Inu Kertapati, Muhammad, "Peace Corps : Misi Perdamaian Amerika Serikat di Indonesia 1963-1965", Skripsi, Universitas Indonesia, 2011.

Mahottama, Shaka, "Analisis Terhadap Implementasi Bantuan World Bank Dalam menekan Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2010", Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Prahastuti Soebiono, Umi, "Peace Corps salah satu strategi kebijaksanaan luar negeri pada masa J.F. Kennedy dalam politik pembendungan 1960-1963", Tesis, Universitas Indonesia, 2014.

Vipassani, Prema, "Upaya ILO-IPEC Melalui WACAP dalam Mengeliminasi dan Mencegah Pekerja Anak pada Perkebunan Kakao di Ghana", Skripsi, Universitas Udayana, 2015.

Jurnal, Artikel, *Paper* dan Report

- Price, Bayard Harry, "The Marshall Paln & Its Meaning", New York, *Cornell University Press Ithaca*, 1955.
- Graha, Rekso & Suzie Sudarman, "Program Peace Corps: Implementasi *Smart Power* Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia". *Jurnal Prisma Vol. 35, No. 1*, 2016.
- Join Evaluation of Paris Declaration, Phase 2; *Final Report*, 2010.
- Kauffman, D, "Aid Effectiveness and Governance: The good, the bad, and the Ugly", *World Bank Outreach.*, February 2009.
- Muljiyanto, Sumardi, "Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah: Tinjauan Kritis dari Masa ke Masa," *PELLBA 6, Bambang Kaswanti Purwo, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.*
- Paris Declaration and Accra Agenda for Action, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm>, diakses tanggal 6 April 2017.
- Radelet, Steven. "A Primer for s Foreign Aid". *Working paper No.92*, 2006.
- "The Role of the Volunteer in Peace Corps' Approach to Development Staging", *Director's Guide Course Number: CEN003.*
- United Nations Development Programme, *About Human Development*, <http://hdr.undp.org/en/humandev>, diakses 12 Maret 2017.
- White, John D, "The Politics of Foreign Aid", *Sydney: The Bodley Head*, 1974.
- Wiley Blackwell, "Dictionary of Human Geography, 5th Edition", *Development. In D. Gregory*, 2009.
- World Bank. "Assessing Aid: What Works, What doesn't, and Why". *A World*

bank Policy Research Report, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Sumber Resmi

- Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri*, 1999.
- Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2014*, Bappenas, Jakarta, 2014. <http://www.bappenas.go.id/id/>, diakses 3 Januari 2017.
- Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015*, (Bappenas: Jakarta), 2015. <http://www.bappenas.go.id/id/>, diakses 3 Januari 2017.
- Peace Corps Indonesia, *Laporan Tahunan 2011*, Peace Corps Indonesia, Surabaya, 2011, <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017.
- Peace Corps Indonesia, *Laporan Tahunan 2012*, Peace Corps Indonesia: Surabaya, 2012, <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017.
- Peace Corps Indonesia, *Laporan Tahunan 2013*, Peace Corps Indonesia: Surabaya, 2013. <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017.

Listia Khairunnisa | Efektivitas Bantuan Pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia

Peace Corps Indonesia, *Laporan Tahunan 2014*, Peace Corps Indonesia: Surabaya, 2014, <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017.

Peace Corps Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*, Peace Corps Indonesia:

Surabaya, 2015, <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>, diakses tanggal 12 Desember 2017.

The Peace Corps, *A Comprehensive Agency Assessment*, Peace Corps, Washington, 2010.